

ABSTRACT

This thesis discusses the power discourse of President Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) in responding to escalating cases of religious intolerance and violence in Indonesia by the end of his leadership tenure. The study herein focuses on cases of religious violence occurring in Yogyakarta. In order to obtain in-depth and comprehensive analysis, critical paradigm method is used in association with critical discourse analysis approach developed by Teun A. van Dijk to examine news published by daily Kompas from May to October 2014. In this study, the critical discourse analysis is applied to analyze the discourse of the president's power through the stages of text analysis, social cognition, and contexts of twelve published articles comprising social facts, legal facts and president's responsibility related to intolerance cases in Yogyakarta. The power discourse analysis on President Yudhoyono related to intolerance cases in Yogyakarta towards the daily Kompas articles published during May to October 2014 found social facts on violence negligence, legal facts on weak law enforcement, and facts on president's inconsistency in implementing responsibility. These three facts showed that SBY was inconsistent with the constitution. Such inconsistency caused the loss of credibility in political communication. For the need of political communication to public, future leaders will expectedly be able to be consistence with the constitution. This power discourse reconstruction is really needed to restore the vision of leaders to maintain the state and political life.

Keywords:

power discourse, critical analysis, text, social cognition, context, intolerance.

ABSTRAK

Tesis ini membahas wacana kuasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam merespon kasus intoleransi dan kekerasan agama di Tanah Air pada tahun akhir masa pemerintahan Presiden SBY dengan berfokus pada kasus kekerasan di Yogyakarta. Untuk mendapatkan analisis mendalam dan komprehensif mengenai hal tersebut digunakan paradigma kritis dengan pendekatan analisis wacana kritis Teun A. van Dijk terhadap pemberitaan Harian Kompas. Penelitian ini bertujuan menganalisis wacana kuasa Presiden SBY menggunakan metoda analisis wacana kritis van Dijk melalui tahapan analisis teks, kognisi sosial, dan konteks terhadap sampel 12 artikel Harian Kompas (Mei sampai Oktober 2014) yang memuat fakta sosial, fakta hukum, dan tanggung-jawab Presiden SBY terkait pemberitaan kasus intoleransi di Yogyakarta. Analisis wacana kuasa Presiden SBY terkait masalah intoleransi di Yogyakarta terhadap teks-teks pemberitaan Harian Kompas dari bulan Mei sampai Oktober 2014 menemukan fakta sosial pembiaran kekerasan, fakta hukum penegakan hukum yang lemah, fakta tanggung-jawab Presiden SBY yang tidak konsisten. Ketiga fakta ini menunjukkan bahwa SBY tidak konsisten menjalankan konstitusi. Pemimpin ke depan diharapkan dalam komunikasi politiknya kepada publik harus konsisten dengan konstitusi. Ketidakkonsistenan tersebut yang menyebabkan pemimpin tidak memiliki kredibilitas dalam komunikasi politik. Rekonstruksi wacana kuasa ini sangat dibutuhkan untuk mengembalikan visi pemimpin untuk menjaga hidup berpolitik dan bernegara.

Kata kunci:

wacana kuasa, analisis kritis, teks, kognisi sosial, konteks, intoleransi.